



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/55/Kept/403.013/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK
LANJUT TEMUAN HASILPEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
DAN APARAT PENGAWAS INTERNALPEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Bupati, wakil Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Wakil Bupati dan dibantu Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dan wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan dan mengkaji terhadap rekomendasi atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah terhadap rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;
 - b. mendorong upaya tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah agar memperoleh penyelesaian secara tuntas; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :188/55/Kept/403.013/2021
 TANGGAL : 5 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK
 LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 DANAPARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2		3
1.	Pembina	1. Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	2. Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Inspektur Kabupaten	
4.	Anggota	Sekretaris Inspektorat	
		1. Inspektur Pembantu Wilayah I	
		2. Inspektur Pembantu Wilayah II	
		3. Inspektur Pembantu Wilayah III	
		4. Inspektur Pembantu Wilayah IV	
		5. Kasubag. Perencanaan pada Inspektorat	
		6. Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	
		7. Kasubag. Administrasi dan Umum pada Inspektorat	
		8. 20 (dua puluh) orang Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat	
			1. Joko Witono, S.E.
			2. Drs.Saim
			3. Ika Hariningsih Harahap, S.H
			4. Andhi Kusmawan, S.E.
			5. Ruly Ruspandito, S.H.
			6. Fatma Ariana, S.T.
			7. Rina Kusumaningtyas, S.Psi.
			8. Triana Mart Santi, S.E.

1	2	3
	<p>9. 17 (tujuh belas) orang Staf pada Sekretariat Inspektorat</p>	<p>9. Sri Rejeki, S.E. 10. Yusuf Kuntioaji, M.T. 11. Herman Susilo, S.E. 12. Muchamad Sahid, S.T. 13. Lava Sejahtera Megantoro, S.T. 14. Luky Riana Windradini, S.E. 15. Fahrizal Saputra, S.E. 16. Erlina Widya Astuti, S.E. 17. Yuanita Intan Dewi, S.E. 18. Jujuk Widyasaputra, S.IP. 19. Ulul Yulianto, S.T. 20. Subroto, S.Sos.</p> <p>1. Nurul Kotimah, S.Kom 2. Bambang Setyana, S.E. 3. Yohanes Deska Handika Christianto, S.E. 4. Andri Widiyanto, S.IP. 5. Arlita Dian Pratiwi, S.IP. 6. Dio Amali Sukma, S.M. 7. Fredi Afiawan, S.H. 8. Halim Prasetyo Hutomo, S.T. 9. Mutiara Dini Sarahati, S.H. 10. Retno Widowati, S.T. 11. Rosidah Kurniawati, S.A. 12. Stevanus Eka Kristiawan, S.H. 13. Aisyah Nur Hanifah, S.T. 14. Yusup Setyadi, SE. 15. Januar Erfan Baikhuni, S.Ak. 16. Sulasih 17. Sri Umiati</p>

BUPATI MAGETAN

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004